PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

Oleh : Mahendra Kusuma, SH, M.Hum

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)

ABSTRAK

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian memang dapat dibenarkan. Sesuai hukum ratifikasi PBB, polisi pengayom, pelindung dan penegak hukum dengan rambu-rambu yang jelas. Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan kekerasan secara fungsional, profesional dan proporsional. Namun, tidak jarang juga aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan. Sudah banyak pelaku tindak pidana yang tewas atau terluka ditembak oleh aparat kepolisian, belum lagi korban yang terkena peluru nyasar petugas ketika akan menangkap penjahat.

A. PENDAHULUAN

Senjata api memang sulit untuk dipisahkan dari tindakan kejahatan dan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Tidak hanya polisi, pelaku kejahatan pun terkadang memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga berlaku di Indonesia, baik polisi maupun pelaku kejahatan memiliki dan menggunakan senjata api sebagai alat untuk kepentingan masing-masing. Polisi menggunakan senjata api untuk menangani kejahatan, sementara pelaku kejahatan menggunakan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Di Amerika Serikat peredaran senjata api sangat memprihatinkan. Menyadari semakin berbahayanya peredaran senjata api di tengah-tengah warga sipil, pada tahun 1993, Pemerintah Amerika Serikat merevisi undang-undang federal, Brady Bill, tentang pengawasan dan pemilikan senjata api oleh warga sipil. Tujuan revisi undang-undang hasil usulan mantan Sekretaris Pers Gedung Putih semasa pemerintahan Reagan, James Brady, ini adalah untuk memperketat syarat-syarat bagi mereka yang hendak memiliki senjata api.²⁸

Secara sederhana dapat digambarkan ada 3 hal yang memungkinkan polisi menembakkan senjata api mereka pada orang lain: (1) Untuk melindungi nyawanya, kemudian dia dalam keadaan bahaya. (2) Untuk melindungi nyawa orang lain. (3) Dalam usaha untuk mencegah perbuatan yang sudah pasti masuk dalam pelanggaran berat atau

²⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 181

untuk mencegah kaburnya penjahat tetapi hanya setelah semua upaya telah dilakukan.

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian memang dapat dibenarkan. Sesuai hukum ratifikasi PBB, polisi pengayom, pelindung dan penegak hukum dengan rambu-rambu yang jelas. Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan kekerasan secara fungsional, profesional dan proporsional. Kekerasan fungsional, karena undang-undang memberi kewenangan pada polisi untuk menggunakan kekerasan menghadapi kekerasan demi terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. De facto, legalitas kewenangan penggunaan kekerasan fungsional tergambar, polisi dipersenjatai lengkap dari borgol, tongkat sampai senjata modern.²⁹

Kekerasan proporsional mengatur bagaimana penggunaan kekerasan menghadapi kekerasan. Praktek proporsional dilapangan menjadi relatif karena kesepadanan sulit diprediksi matematis dari akibat yang timbul seperti hancurnya berbagai fasilitas umum dengan kerugian jiwa dan materi. Kekerasan profesional, menuntut penggunaan kekerasan secara profesional dari segi peralatan maupun sasaran. Tetapi aparat tak bisa disalahkan karena cuaca, perubahan arah angin atau penonton yang terkena pentungan polisi saat menghadapi kekerasan massa.³⁰

Namun, tidak jarang juga aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan³¹. Sudah banyak pelaku tindak pidana yang tewas atau terluka ditembak oleh aparat kepolisian, belum lagi korban yang terkena peluru nyasar petugas ketika akan menangkap penjahat.

B. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, muncul permasalahan yaitu : bagaimanakah penjatuan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian?

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain: (1) Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar

29 Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2003, hlm. 80

30 Ibid, hlm. 81

31 Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 109

peraturan disiplin; (2) Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan (3) Pelanggaran hukum, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.³²

Peraturan Disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin. Yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RI adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara RI.

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Kalau penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankom dan atau Atasan Ankom yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi: Ankom berwenang penuh, Ankom berwenang terbatas, dan Ankom berwenang sangat terbatas.³³ Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota Polri, maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran. Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin, menurut Pasal 15 PP Nomor 2/2003, adalah (a) atasan langsung; (b) atasan tidak langsung; dan (c) anggota Provost Polri sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Khusus bagi anggota Provost dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa: teguran lisan dan/atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.³⁴

Masyarakat yang dirugikan atas perbuatan dan tindakan anggota Polri dapat melakukan laporan atau pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada petugas piket Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Bidang Propam Polda. Kemudian laporan akan diteruskan ke Kanit Riksa Bid Propam. Selanjutnya akan ditunjuk petugas/anggota

32 Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 138

33 Ibid. hlm. 139

34 Ibid

pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa laporan tersebut yang dituangkan dalam bentuk BAP Terperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh provost adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik.

Setelah BAP Terperiksa, BAP Pelapor, BAP Saksi-Saksi sudah lengkap, maka berkas siap untuk disidangkan, dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bid Propam. Penyelenggaraan Sidang Disiplin oleh Ankum dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos (Pasal 22 PP Nomor 2/2003). Bid Propam kemudian mengirim surat ke Fungsi tempat Terperiksa berdinis untuk memberitahukan jadwal sidang dan memerintahkan Fungsi terkait untuk menyiapkan Perwira Pendamping/Pembela.

Pada saat persidangan, Ankum tempat Terperiksa berdinis menjadi Ketua Sidang. Perwira Bid Propam ditunjuk menjadi Penuntut, dan Perwira Pendamping Terperiksa menjadi Pembela. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu: (a) situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi; (b) pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; dan (c) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud situasi dan kondisi adalah suasana pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas menangkap pelaku tindak pidana yang membahayakan masyarakat, pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkhis dan/atau massa yang memprovokasi tindakan kekerasan.

Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada Terhukum. Bentuk hukuman disiplin menurut Pasal 9 PP Nomor 2/2003 berupa: (a) teguran tertulis; (b) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun; (c) penundaan gaji berkala; (d) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; (e) mutasi yang bersifat demosi; (f) pembebasan dari jabatan; (g) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Provost melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.

Kendati demikian, anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan tertulis yang disampaikan kepada atasan Ankum melalui Ankum dengan mencantumkan alasan keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin. Ankum wajib meneruskan pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankum (Pasal 30 PP Nomor 2/2003). Pemberian hak untuk mengajukan keberatan itu dimaksudkan untuk menghormati hak asasi terhukum, karena belum tentu hukuman yang

dijatuhkan Ankum benar dan belum tentu pula tuduhan pelanggaran disiplin terbukti kebenarannya. Esensi dari ketentuan pemberian hak kepada terhukum untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum itu juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau balas dendam yang dilakukan Ankum kepada pelanggar disiplin selaku bawahannya.

Jika keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankum menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum. Sebaliknya, jika keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankum membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum. Sedangkan jika keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum. Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan terhukum dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri. Putusan atasan Ankum ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Surat Keputusan atasan Ankum disampaikan kepada pemohon keberatan dan merupakan keputusan akhir. Artinya terhadap keputusan atasan Ankum tersebut tidak dapat diajukan keberatan lagi kepada pejabat/atasan yang lebih tinggi.

Namun, jika dalam jangka waktu 14 hari anggota Polri yang dijatuhi hukuman tidak mengajukan keberatan, maka berarti yang bersangkutan dianggap menerima putusan hukuman tersebut, sehingga hukuman disiplin dijalankan mulai hari ke-15. Ketentuan tersebut wajar, karena apabila seorang terhukum menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka menurut teori hukum dikatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga secara hukum putusan tersebut harus segera dilaksanakan (*dieksekusi*) demi tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Ada kalanya terjadi pelanggaran disiplin sekaligus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka, penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri.

Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.

Komisi Kode Etik dibentuk di lingkungan Polri bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang memiliki sifat otonom yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP).³⁵ Keberadaan Komisi Kode Etik Polri ini merupakan perintah dari Pasal 35 Undang-Undang Kepolisian Negara RI yang menyebutkan: “pelanggaran atas Kode Etik Profesi oleh pejabat Polri diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri”.

Jadi, pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri. Komisi ini dibentuk di semua tingkat organisasi, yang berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pemberian sanksi moral tersebut penerapannya tidak dilakukan secara kumulatif, namun terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang Komisi. Adapun bentuk sanksi moral atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat berupa: Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; dan Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.³⁶

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban dari tindakan aparat kepolisian, misalnya salah tembak atau penembakan tanpa SOP dapat juga menyelesaikan kasusnya melalui peradilan umum. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, artinya pelanggaran hukum bagi setiap anggota Polri yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah peradilan bagi rakyat pada

35 Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Op. Cit, hlm. 141

36 Sadjijono, *Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Alfina, Surabaya, 2006, hlm. 78

umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Di sini telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai persidangan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berlakunya hukum acara pidana bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara RI yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum”, artinya menurut KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara RI, disamping itu PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, “penyidik” yang berwenang untuk melakukan penyidikan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah “penyidik Polri”. Disini terjadi benturan secara kelembagaan, dimana penyidik seorang anggota Polri, memeriksa anggota Polri yang ada dalam satu lembaga, sehingga memungkinkan timbulnya rasa ketidakadilan, bahkan membuka peluang sikap subyektif bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, dengan kata lain tidak netral. Untuk menghindari kondisi dimaksud perlu dibentuk penyidik khusus untuk pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang eksistensinya terlepas dari pengaruh organisasi.³⁷

Apabila masyarakat/pihak korban juga mengadukan tindak kriminalnya ke Reskrim melalui SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian, maka peradilan disiplin menunggu hasil dari peradilan umum. Apabila terbukti bersalah di Peradilan Umum dan dijatuhi hukuman lebih dari 2 tahun maka Terperiksa tadi, dalam kedinasannya yang seharusnya disidang Disiplin, maka Bid Propam dapat meningkatkan proses sidangnya dari Sidang Disiplin menjadi Sidang Kode Etik Kepolisian (KKEP) dan hukuman yang dapat ditambahkan selain hukuman pokok adalah hukuman tambahan berupa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas kepolisian, disamping Terperiksa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

³⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 348

D. SIMPULAN

Penjatuan sanksi hukum terhadap pelanggaran penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam penanganan tindak kriminal diawali dengan jalan melaporkan oknum polisi tersebut ke bagian Propam untuk kemudian diselidik benar tidaknya laporan masyarakat tersebut. Bila terbukti benar, oknum polisi tadi akan disidangkan di peradilan profesi Kepolisian dan akan mendapatkan sanksi. Masyarakat juga dapat membawa kasus tersebut ke ranah hukum pidana untuk disidangkan pada peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2003

Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008

-----, *Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Alfina, Surabaya, 2006

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri